

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Politik Pariwisata

Politik sangat erat hubungannya dengan pariwisata karena pariwisata tidak dapat dilepaskan dari kegiatan politik suatu negara dimana industri pariwisata itu berada. Berbagai kegiatan yang dilakukan aparat dan organisasi pemerintah baik melalui, peraturan, norma, larangan dan sebagainya akan mempengaruhi kenyamanan wisatawan dalam melakukan kunjungan.¹ Politik pariwisata adalah integrasi dari kedua konsep berbeda, yaitu politik dan pariwisata. Dalam lingkup akademik lebih familiar dengan istilah “*politics* atau *policy*”. Plato dan Aristoteles mengartikan *politics* sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat politik.² Selain itu, *policy* dapat diartikan sebagai upaya seseorang dalam mengembangkan maupun mempertahankan kekuasaan yang telah dimiliki. sementara itu, *policy* merupakan tindakan individu maupun kelompok guna mempengaruhi pihak lain, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dengan adanya konsep politik dan pariwisata yang dikarenakan proses pengembangan suatu objek tidak akan terlepas dari proses politik. Karena, politik adalah sebuah cara yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok, untuk mewujudkan atau merebut kekuasaan didalamnya.

Menurut Robert McIntosh dan Shashikant Gupta, pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses mencari dan melayani wisatawan-wisatawan serta para pengunjung lainnya. Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa dalam negara politik identik dengan *power, decision making, public policy, and allocation or distribution*.³ Pengembangan suatu bidang tidak bisa terlepas dari proses Politik begitupun dengan bidang Pariwisata. Pariwisata merupakan suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri untuk mencari kepuasan dari apa yang dialaminya setiap hari. Sementara

¹ Nyoman S. Pendit, Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2003. Hal.133.

² Prof. Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. 14

³ Prof. Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. 14

itu, Rod Hague berpendapat bahwa politik merupakan aktivitas yang berkaitan dengan cara kelompok dalam upaya menyatukan perbedaan dengan keputusan yang bersifat mengikat dan kolektif. Sedangkan Andrew Heywood berpendapat bahwa politik yaitu tindakan bangsa dalam upaya mengatur kehidupan masyarakat melalui peraturan yang telah diamandemen.⁴

Politik menjadi suatu hal yang senantiasa berkaitan dengan berbagai pengembangan bidang suatu negara, seperti pariwisata. Pariwisata merupakan tindakan individu maupun kelompok dalam melakukan perjalanan yang dapat merekam perjalanan manusia maupun tidak.⁵ Pariwisata memiliki implikasi terhadap pembangunan yang bersifat membantu masyarakat sekitar objek wisata maupun masyarakat luar. Secara umum terdapat tiga bentuk yaitu pariwisata yang menawarkan keindahan alam, budaya dan destinasi khusus. Pariwisata dapat memberikan dorongan langsung bagi kemajuan pembangunan, mendatangkan keuntungan dan kegembiraan bagi masyarakat lokal maupun bagi mereka yang datang dari luar. Britton menempatkan kritik sosial pada pariwisata dalam kerangka masyarakat kapitalis. Selain itu, Urry menyatakan bahwa konsumsi jasa pariwisata tidak dapat dipisahkan dari hubungan-hubungan sosial yang terkait di dalamnya. Oleh karenanya, pertimbangan faktor politik dalam aktivitas kepariwisataan terutama dalam pemanfaatan waktu senggang *leisure time* bukan semata-mata hasil dari kekuasaan ekonomi dan sosial, melainkan juga sebagai hasil dari perjuangan politik.

Pariwisata memiliki beberapa bagian dari pariwisata, diantaranya adalah tujuan wisata alam yang pertama. Tempat alam mana yang sangat indah, sehingga bisa dikembangkan dengan baik. Kedua, daya tarik budaya, yang terbentuk atas dasar karya manusia atau berupa warisan budaya pada zaman dahulu. Ketiga, destinasi khusus, destinasi wisata yang dikembangkan berdasarkan pemenuhan keinginan wisatawan tertentu dan sebagian besar terkait dengan hobi dan preferensi wisatawan. Suatu perjalanan dapat dibedakan menjadi dua jenis Pertama, perjalanan seseorang fenomenanya tercatat oleh statistik kepariwisataan, seperti akan tercatat di lingkungan imigrasi dimana pada saat orang tersebut melakukan perjalan penerbangan ke negara lain ataupun melakukan

⁴ Prof. Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. 14-16

⁵ Ajeng Puspita P. Politik Pariwisata (Studi Strategi Pemerintah Kota Tasikmalaya Dalam Pengembangan Sektor Wisata Alam Situ Gede. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi*. 2018. 16

perjalanan laut seperti pelabuhan atau bahkan perhotelan menggunakan jasa akomodasi atau destinasi wisata tertentu pada saat orang tersebut membeli tiket. Kedua, perjalanan seseorang fenomenanya tidak tercatat oleh statistik kepariwisataan.⁶ Nyoman S Pedit juga menerangkan bahwa pariwisata dapat memberikan dorongan langsung terhadap kemajuan pembangunan, memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi masyarakat dalam lingkungan daerah wilayah yang bersangkutan maupun bagi wisatawan pengunjung dari luar.⁷

Pariwisata merupakan elemen yang mempunyai implikasi besar terhadap taraf perekonomian, sehingga mendapatkan perhatian khusus oleh negara. Rai Utama I Gusti Bagus berpendapat bahwa implikasi positif tersebut yaitu:

a. *Foreight Exchange Earning*

Pariwisata menjadi skrtor yang kian dikembangkan oleh setiap negara. Sebab pariwisata dapat mengembangkan taraf perekonomian masyarakat lokal. Di sisi lain seiring berkembangnya pariwisata dan perekonomian masyarakat dapat menarik berbagai invenstor. Dengan tergiurnya negara pada sektor pariwisata, banyak sekali pariwisata ini dijadikan penghasilan utama bagi negara tersebut. Walaupun belum meningkat secara signifikan, namun mereka yang penghasilan utamanya dari sektor pariwisata memang banyak sekali.

b. *Contribution To Government Revenues*

Pariwisata secara langsung maupun tidak, memberikan kontibusi yang besar terhadap pendapatan negara. Pendapatan yang didapatkan negara melalui pajak jual beli tiket diobjek wisata maupun retribusi didekat objek pariwisata. Selain itu, pendapatan negara berasal dari bea cukai barang import yang dikenakan oleh wisatawan yang berkunjung.

c. *Employment Generation*

Pariwisata berkontribussi dalam lapangan kerja, sebab dengan adanya pariwisata yang berkembang dapat membuka berbagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Baik dalam hal transportasi maupun akomodasi bagi wisatawan.

d. *Infrastructure Development*

⁶ Ajeng Puspita P. Politik Pariwisata (Studi Strategi Pemerintah Kota Tasikmalaya Dalam Pengembangan Sektor Wisata Alam Situ Gede. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi*. 2018. 16

⁷ Nyoman S. Pedit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2003. 133.

Tumbuh pesatnya sektor pariwisata menuntut pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur yang baik. Adanya infrastruktur yang memadai dapat memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata yang diinginkan. Indfrastruktur dapat berupa jalan yang bagus, air bersih, ATM dan sebagainya.

Disisi lain dampak positif hadirnya sektor pariwisata juga menimbulkan implikasi negatif. Dalam pengembangan pariwisata implikasi tersebut yaitu adanya kebocoran improt dan eksport. Kebocoran ini seperti pembelanjaan barang-barang yang bersertandar internasional yang tidak dapat ditemukan dalam negeri dan modal dalam pembangunan infastruktur guna menunjang sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata dengan standar internasional menjadi beban bagi negara, yang kemudian biasanya membebani sektor pajak dalam artian pemerintah fokus pada perpajakan untuk membangun infrastruktur di sektor yang mengharuskan orang membayar pajak yang meningkat.⁸

Pada banyaknya pembangunan pada sektor pariwisata yang selaras pada wawasan lingkungan, meningkatkan dan menumbuhkan potensi pariwisata yang ada dengan harus memperhatikan kelestarian alam dan budaya leluhur yang ada. Di dalam islampun sudah diajarkan untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan yang terkandung dalam ayat-ayat Alquran du antaranya pada surat Al A'raf ayat 56 yang berbunyi:

(وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦)

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Pada ayat yang sudah dijelaskan diatas mengenai jangan membuat kerusakan di bumi kita harus mampu menjaga dan melestarikan hasil bumi atau kebudayaan yang ada. Maka dari itu, perlu kita waspada dalam pengelolaan wisata-wisata alam tetap harus menjaga keindahan alam yang baik. Dari ayat diatas juga sudah dijelaskan tentang jangan merusak bumi yang dijelaskan oleh firman allah SWT. Selain jangn merusak bumi yang diciptakan oleh

⁸ Utama, Gusti Bagus.2017. Kajian Pariwisata Dari Perspektif Ekonomi. Di <https://www.researchgate.net/publication>

allah kita juga harus bisa menjaga serta melestarikan budaya-budaya dan keindahan alam yang sejak zaman sekarang di buat menjadi wisata alam yang sangat diminati oleh para wisatawan.

Menurut definisi-definisi oleh para ahli, dapat dipahami bahwa politik pariwisata merupakan dua konsep yang dijadikan menjadi satu. Yang dimaksud dengan dua konsep tersebut, pertama politik dan kedua pariwisata. Dengan adanya penggabungan dua konsep tersebut bisa kita simpulkan bahwa, politik merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok untuk memperoleh, mempertahankan atau mengembangkan suatu hal yang dimiliki.

Sedangkan pariwisata, merupakan suatu perjalanan seseorang atau sekelompok orang yang ingin bertamasya dari tempat tinggalnya ke tempat yang dituju untuk berwisata. Dengan penggabungan dua kata politik dan pariwisata tersebut maka, dapat dijelaskan bahwa politik pariwisata merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk mengembangkan pariwisata serta memperkuat perekonomian masyarakat yang daerahnya terdapat keindahan-keindahan alam yang bisa dinikmati oleh masyarakat umum.

2. Kekuasaan Elit

a. Pengertian Elite

Perbedaan merupakan hal yang wajar dalam bersosial masyarakat. Baik perbedaan secara fisik maupun non fisik, seperti warna kulit, tinggi badan, bentuk rambut, kecerdasan, kekayaan dan sebagainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan dalam satu masyarakat dapat berbeda dari perbedaan dengan masyarakat lain. Misalnya, dalam masyarakat, kesenjangan antara yang kaya dan yang tidak tergolong miskin sangat besar. Kelompok lain mungkin tidak hanya mempunyai perbedaan dalam taraf perekonomian, tetapi juga pendidikan. Sehingga keragaman masyarakat tidak hanya mengenai tingkatannya, namun dapat juga berkaitan dengan jenisnya.

Perbedaan yang tak terelakkan di antara anggota masyarakat merupakan titik awal pembentukan kelompok yang lebih tinggi. Anggota masyarakat yang memiliki kelebihan tersebut secara bergiliran bergabung dalam suatu kelompok yang disebut sebuah kelompok elit. Keunggulan bawaan mereka membuat mereka bergabung dengan kelompok elit yang berbeda dari kebanyakan anggota masyarakat yang tidak memiliki kelebihan. Terminologi elit, seperti yang diungkapkan oleh ahli teori elit seperti Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, dan

Suzanne Keller, mengacu pada kelompok atau kelompok sosial yang memiliki superioritas atau keunggulan atas kelompok atau kelompok lain. Dengan adanya keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh individu-individu yang menduduki strata paling atas dalam masyarakat serta keterampilan yang dapat berpengaruh pada masyarakat yang menduduki strata dibawahnya.

Sementara itu, Pareto menggambarkan definisi elit dalam bentuk penilaian indeks dalam taraf kehidupan. Seperti seorang pedagang atau pengusaha yang berpenghasilan ratusan juta berindeks 10, pengusaha berpenghasilan puluhan juta berindeks 7, pengusaha berpenghasilan belasan juta berindeks 4, dan pengusaha berpenghasilan ratusan ribu rupiah berindeks 1.⁹ Menurut Pareto gambaran ini menunjukkan bahwa masyarakat berindeks tinggi tergolong kelompok elit dan masyarakat berindeks kecil tidak tergolong kelompok elit.

Pengertian elit yang sudah ada dalam pemaparan para ahli diatas, dapat kita pahami bahwa elit adalah seseorang yang mempunyai kelebihan dalam bidangnya yang mampu mempengaruhi orang-orang yang ada dibawahnya. Selain itu, elit juga bisa disebut orang yang memiliki keunggulan yang menduduki jabatan diatas, yang jumlahnya lebih sedikit dari massanya. Elit dalam kelompok masyarakat merupakan individu dalam kelompok yang kelebihannya diakui oleh kelompok lain dalam masyarakat agar mampu mempengaruhi individu-individu lainnya dalam sebuah kelompok.

b. Pengertian Kekuasaan

Harold D Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi individu satu ke individu lainnya. Harold D Laswell dan Abraham Kaplan beralasan bahwa “Seandainya hanya ada dua orang dalam sistem, A dan B. A mempengaruhi B sejauh dia mengubah tindakan atau kecenderungan B dalam beberapa cara.” Ungkapan ini tentunya memiliki keterkaitan dengan perlakuan, yaitu suatu upaya mempengaruhi pihak lain sesuai kehendak pihak yang mempengaruhi.

Sejalan dengan ungkapan Harold D Laswell dan Abraham Kaplan, Mohtar Mas’oed dan Nasikun juga mengungkapkan bahwa kekuasaan merupakan kecakapan

⁹ Pembahasan Vilfredo Pareto dalam bukunya “*Te Mind and Society*” dikutip dari Bottomore, Tom B. *Elite and Society*, New York: Penguin Books Ltd., 1982, hlm. 7.

individu maupun kelompok dalam mempengaruhi individu maupun kelompok lain untuk melaksanakan hal yang tidak diinginkan sebelumnya. Maka konsep kekuasaan berkaitan dengan unsur paksaan, yaitu keterpaksaan kelompok yang terpengaruh untuk mengikuti kehendak yang mempengaruhi.

Definisi kekuasaan ini mengundang kritik, terutama bagaimana menentukan apakah perilaku pihak yang terpengaruh sesuai dengan perilaku influencer. Ramlan Surbakti yang mempertanyakan rumusan gagasan tersebut, khususnya yang disampaikan oleh Dahl. Dia bertanya bagaimana secara empiris mengetahui perilaku partai yang bersangkutan. Bagaimana Anda tahu apakah itu selaras dengan kehendak yang memengaruhinya atau tidak.

c. Stratifikasi Politik

Setiap masyarakat diharapkan memiliki pemimpin. Secara umum individu atau kelompok individu dengan kepentingan tertentu dipandang sebagai pemimpin dalam kelompoknya. Mereka menarik orang lain ke dalam aktivitas sosial dengan menonjolkan keuntungan mereka sendiri. Perlu dipahami bahwa kelompok orang yang menduduki posisi kepemimpinan secara alami jauh lebih kecil daripada yang menonjol. Konsekuensi logisnya adalah mereka yang dapat dimasukkan dalam kelompok pemimpin atau dominan karena memiliki kepentingan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pareto dan Mosca berpenpat bahwa dalam lapisan elemen masyarakat, pasti terdapat kelompok minoritas yang mengendalikan masyarakat lainnya. Kelompok minoritas tersebut merupakan golongan elit “*governing elite*” yang memerintah (politik) maupun tidak sedang memerintah (memiliki kekuatan untuk mempengaruhi politik). Sehingga dalam stratifikasi politik, kedudukan individu maupun kelompok sangat berpengaruh terhadap kekuasaan individu maupun kelompok. Semakin tinggi kedudukan maka semakin besar kekuasaan yang dikcangkupnya.

Sementara itu, Putman mericikan stratifikasi politik menjadi enam lapisan yaitu, 1) *proximate decision makers* (kelompok pembuat kebijakan); 2) *influential* (kelompok yang berpengaruh secara tidak langsung); 3) Lapisan aktifis (kelompok yang aktif dalam aktifitas politik maupun pemerintahan); 4) Pengamat politik (Individu atau kelompok yang beranggapan bahwa politik sebagai tontonan menarik); 5)

Voters (kaum pemilih yang hanya bisa mempengaruhi aktifitas politik melalui pemilihan umum); 6) *Non Participan* (individu maupun kelompok yang tidak mempunyai pengaruh terhadap aktifitas politik).



Gambar 2.1 Piramida masyarakat menurut Putnam

Pendapat Putman mengenai stratifikasi politik selaras dengan ungkapan Preto, Mosca dan Dorso. Golongan elit merupakan golongan yang berkedudukan mendekati lapisan atas hingga paling atas. Sementara itu, golongan yang mendekati bawah atau paling bawah merupakan golongan yang disebut dengan massa. Dalam pembentukan stratifikasi ini Putman berparadigma pada antusias individu dalam aktifitas politik. Antusias dan intensitas individu sanagat beragam, sehingga terbentuklah berbagai lapisan.

Putnam mengatakan para pemimpin militer dapat mempengaruhi kebijakan pertahanan tetapi memiliki pengaruh yang sangat kecil dalam masalah pertanian. Sebaliknya, ada kelompok yang pengaruhnya kurang luas karena mereka sangat kecil.¹⁰ Pandangan Putnam dapat diringkas dengan mengatakan bahwa golongan elit yang memegangkendali dapat memerankan peran yang berbeda di tempat yang berbeda. Besar kecilnya peran dakwah dan luasnya bidang kegiatan tergantung pada kapasitas dan kekuasaan elite yang berkedudukan. Golongan elit yang mempunyai kendali dan bakat memiliki peluang untuk memerankan peran dalam cangkupan yang besar.

¹⁰ Robert D Putnam, *Studi Perbandingan Elit Politik*, yang termuat dalam Mohtar Mas' oed dan Colin MacAndrews (ed.), *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1978, hlm. 74–77.

Selain itu, Putnam menegaskan bahwa dalam golongan elit hanya terdapat dua golongan elit, yaitu golongan yang secara langsung dan dapat menentukan kebijakan dan golongan yang tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang ditentukan. Namun tidak menutup kemungkinan pemikiran golongan pertama memiliki keselarasan dengan pemikiran golongan kedua. Meskipun pemikiran golongan kedua selaras dengan pemikiran golongan pertama, tetapi pemikiran ini bersifat semu. Golongan elit yang memiliki pengaruh secara langsung, dalam menentukan kebijakan tentunya tetap harus mempertimbangkan reaksi pihak lain. Penentuan kebijakapun perlu dipahami secara optimal, baik penentuan waktu berlakunya dan sebagainya. Sehingga kebijakan yang ditentukan lebih efektif untuk dijalankan.

Di tengah elemen masyarakat, mengenai individu maupun kelompok pemegang kekuasaan yang nyata tentunya menimbulkan kebingungan. Sebab terdapat golongan yang benar-benar secara langsung berpengaruh menentukan kebijakan dan yang tidak. Dalam hal ini Putnam mengklasifikasikan tiga cara dalam mengidentifikasi elit politik, yaitu 1) analisis posisi; 2) analisis reputasi; 3) analisis keputusan.¹¹

3. Teori Kebijakan Publik

a. Pengertian kebijakan publik

Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. *Policy* atau secara umum dikenal dengan kebijakan adalah alat atau pedoman guna mengatur kehidupan elemen masyarakat. Kebijakan kental kaitanya dengan rencana, perumusan dan keputusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan mengevaluasi implikasi dari kebijakan yang telah dijalankan.

Politik merupakan keputusan mutlak yang ditandai dengan konsistensi perilaku pembuat keputusan. Secara sentral, politik adalah alat teknis, rasional, dan berorientasi tindakan untuk memecahkan masalah. Kebijakan adalah rencana tindakan yang memandu dan memengaruhi perilaku mereka yang dipengaruhi oleh keputusan. Kebijakan dirancang dan dibuat secara sadar sehingga perilaku populasi (kelompok

¹¹ Robert D Putnam, "Studi Perbandingan Elit Politik" yang termuat dalam Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews (ed.), *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1978, hlm. 74–77.

sasaran) yang dituju dimodelkan sesuai dengan nada dan kata-kata kebijakan.¹²

Thomah R Dye mengemukakan bahwa kebijakan merupakan “*whatever government choose to do or not to do*”. Pemerintah dalam melakukan aktifitas harus mempunyai pencapaian yang bersifat objektif dan kebijakan harus mencangkup tindakan pemerintah.¹³ Maka dapat dipahami bahwa tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan kemauan pemerintah maupun pejabat pemerintah. Melainkan demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan berbagai definisi sebelumnya dapat ditarik pemahaman bahwa kebijakan mencangkup 5W 1H “*what, why, who, where, and how*”. Pertanyaan ini berakitan dengan problem yang dihadapi lembaga yang terkait dengan isi, tahapan yang diputuskan, cara, waktu pengambilan kebijakan dan waktu pelaksanaannya. Kebijakan publik mencangkup berbagai hal yang ditentukan dan dilakukan maupun tidak oleh pemerintah. Disisi lain, kebijakan publik juga kebijakan yang dibuat maupun dikembangkan elemen pemerintah. Secara umum maka kebijakan publik dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Aktifitas terencana guna mengapai tujuan.
- b. Pada dasarnya terdiri dari tindakan yang saling berhubungan.
- c. Berkaitan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah di suatu sektor atau apa yang dimaksudkan untuk dilakukan.
- d. Dapat bersifat positif ketika tindakan tersebut guna memecahkan masalah dan bersifat negatif apabila pemerintah tidak mengambil tindakan.
- e. Aturan dan regulasi yang memaksa berfungsi sebagai landasan kebijakan.¹⁴

Kebijakan publik sebagai cara pendistribusian nilai-nilai kekuasaan kepada semua pihak. Dalam pengertian ini, penentuan kebijakan merupakan hak prerogatif pemerintah untuk melakukan tindakan yang kondusif bagi kemajuan masyarakat. Tindakan semacam itu merupakan pilihan yang disengaja dari

¹² Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 20.

¹³ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy* (New Jersey: Prentice, Hall, 2015), 113.

¹⁴ James E. Anderson, *Public Policy Making* (New York NJ: Holt Reinhartnwinston, 2010).

pihak pemerintah dan berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan nilai - nilai ke seluruh masyarakat. Aktor dan institusi politik mempunyai letak strategis. Interaksi aktor dan institusi berdampak pada proses dan taktik perjalanan komunitas politik.¹⁵

Manajemen merupakan terjemahan dari kata “*manajemen*” dan penambahan cepat kosakata bahasa Indonesia akan menghasilkan istilah bahasa Inggris Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berakar dari kata “*manage*” yang artinya mengatur, tata tertib dilakukan melalui proses dan disusun menurut hirarki fungsi manajemen. Dengan demikian, manajemen adalah proses pencapaian tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan, dan pengendalian. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia mengatakan bahwa manajemen adalah proses atau cara memimpin atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan mengerahkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, atau proses yang menjamin pengendalian segala hal yang berkaitan. dalam melaksanakan kebijakan dan mencapai tujuan.¹⁶

Suharsimi Arikunta berpendapat bahwa manajemen adalah substansi manajemen, sedangkan manajemen adalah kegiatan mulai dari menghimpun informasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi. Kemudian dijelaskan bahwa manajemen menghasilkan sesuatu dan sesuatu itu dapat menjadi sumber penyempurnaan dan perbaikan dalam manajemen selanjutnya.¹⁷

Marry Parker Follet (1997) berpendapat bahwa manajemen memerlukan penerapan teknik dan strategi yang terampil untuk mencapai tujuan secara efektif dalam mengejar hasil yang diinginkan. Dalam pencapaian hal tersebut terdapa tiga elemen yang perlu diperhatikan:

- a. Pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.
- b. Tahapan yang dilakukan secara runtut, yaitu mencakup *planning, organizing, actuating and controlling*.

¹⁵ Muhlis Madani, *Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

¹⁶ Daryanto, *kamus indonesia lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997).

¹⁷ Suharsimi arikunta, *pengelolaan kelas dan siswa*, (jakarta: CV. Rajawali, 1988).

c. Terdapat hasil yang didapatkan.¹⁸

Manulung mengemukakan bahwa manajemen mencakup tiga definisi, yaitu 1) sebagai proses (tahapan mengatur dan mengendalikan tujuan yang hendak direalisasikan); 2) sekelompok individu yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan manajemen suatu organisasi (menjalankan fungsi administrasi); 3) manajemen sebagai art (ilmu mengenai perencanaan, mengelompokan, menggerakkan Sumber daya manusia guna mengapai tujuan sebelumnya).

Maka dapat ditarik pemahaman bahwa manajemen merupakan tahap merencanakan, mengorganisasi, mengawasi dan mengevaluasi guna mengapai tujuan yang disepakati agar berjalan secara efektif dan efisien. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah :

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan melibatkan pemilihan yang cermat dan integrasi informasi faktual , serta penguatan asumsi mengenai hasil masa depan. Proses ini sangat penting untuk secara efektif memvisualisasikan dan merumuskan kegiatan yang diusulkan, yang pada akhirnya mengarah pada pencapaian hasil yang diinginkan. Proses perencanaan melibatkan kegiatan pengambilan keputusan, karena memerlukan identifikasi dan pemilihan berbagai alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Keterampilan kognitif membayangkan dan mengantisipasi merupakan prasyarat untuk merancang urutan perilaku yang dapat dilakukan dalam masa depan.

2) Pengorganisasian (*Orginizing*)

Sp Siagian MPA mendefinisikan bahwa pengorganisasian mengacu pada prosedur komprehensif untuk mengkategorikan individu, alat, tugas, tanggung jawab, dan kekuasaan dengan cara yang membentuk suatu entitas yang mampu berfungsi secara kohesif menuju pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya . Pengeorganisasian merupakan tahapan yang sangat penting dalam pengelolaan yang melibatkan berbagai pihak agar tanggungjawab serta tugas-tugasnya ditentukan dalam tahapan ini. Tahapan pengeorganisasian dilakukan dengan tujuan dan digerakkannya kelompok-

¹⁸ Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *pengantar manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Goup, 2009)

kelompok untuk bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

3) Penggerakan (*Actuating*)

Istilah mobilisasi dapat mencakup berbagai tindakan yang ditujukan untuk memotivasi individu dalam suatu organisasi agar berkomitmen penuh untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui perencanaan dan organisasi yang efektif.

Mobilisasi meliputi identifikasi dan pemenuhan kebutuhan manusia personel, insentif, kepemimpinan, pengembangan, dan inisiasi operasi atau manuver operasional. Hal ini melibatkan kegiatan manajerial yang ditujukan untuk memulai dan mempertahankan kegiatan yang direncanakan dan komponen organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan melibatkan verifikasi bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan bahwa instruksi yang diberikan sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati. Selain berkenaan dengan pengendalian, terdapat pula pengawasan yang dalam arti pembinaan dan pemberdayaan. Dengan menjalankan fungsi pengawasan, seluruh personalia organisasi memiliki rasa pengabdian, komitmen dan loyalitas yang tinggi pada pekerjaan dan organisasi tempatnya berkerja. Pengawasan juga merupakan pengamatan terhadap seluruh kegiatan para pekerja dilihat dari relevansinya dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan.

B. Penelitian Terdahulu

Penulis mengidentifikasi sejumlah isu yang berkaitan dengan pendekatan pemerintah terhadap pengembangan wisata yang diambil dari penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Lia Afriza, Haryadi	Pengelolaan Desa Wisata	Persamaan penelitian ini	Sedangkan perbedaan

	Darmawan, dan Anti Riyanti. (2020)	Di Provinsi Jawa Barat ¹⁹	dengan yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai pengembangan obyek wisata	penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti yaitu perbedaan pada obyek.
2.	Irfan Nur Rachman (2016)	Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945 ²⁰	Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai politik pengelolaan	Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti yaitu perbedaan pada obyek.
3.	Dewa Putu Oka Prasiasa (2022)	Pengembangan Daerah Wisata dalam Bingkai Politik Pariwisata ²¹	Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai Desa wisata dan politik pariwisata.	Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti yaitu perbedaan pada obyek.
4.	Ingga Purwanti (2019)	Strategi Kelompok Sadar Wisata Dalam	Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan	Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang

¹⁹ Lia Afriza, Dkk, Pengelolaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Sains Terapan Pariwisata* Vol. 5 No. 3, 306-315.

²⁰ Irfan Nur Rachman, Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016.

²¹ Dewa Putu Oka Prasiasa, Pengembangan Desa Wisata Dalam Bingkai Politik Pariwisata, *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (Jsai)* Volume 3, Nomor 1, Maret 2022, 55-68.

		Penguatan Desa Wisata ²²	peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai pengembangan obyek wisata.	dilakukan peneliti yaitu perbedaan pada obyek.
5.	Andi Moh. Rifiyan Arief (2016)	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Politik Birokrasi Pariwisata ²³	Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai politik pariwisata.	Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti yaitu perbedaan pada obyek.
6.	Nurul Hasanah Ramadhan i, Agustinus Pati, dan Trilke Tulung (2018)	Politik Ekologi Ekowisata Di Taman Wisata Alam Batu Putih Kelurahan Batu Putih Bawah ²⁴	Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai politik wisata.	Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti yaitu perbedaan pada obyek.
7.	Mahatva Yoga Adi Pradana dan Ratna Istriyani (2020)	Sepakat-Sepakat: Modal Sosial Politik Masyarakat Kalitekuk Dalam	Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas	Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti yaitu perbedaan

²² Ingga Purwanti, Strategi Kelompok Sadar Wisata Dalam Penguatan Desa Wisata, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* ISSN. 2442-6962 Vol. 8 No. 3 (2019).

²³ Andi Moh. Rifiyan Arief, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Birokrasi Politik Pariwisata, Jurnal Administrasi Pembangunan*, Volume 4, Nomor 2, Maret 2016, 87-156.

²⁴ Nurul Hasanah Ramadhani, Dkk, Politik Ekologi Ekowisata Di Taman Wisata Alam Batu Putih Kelurahan Batu Putih Bawah, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Volume 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulang.

		Mewujudkan Desa Wisata ²⁵	mengenai politik wisata.	pada obyek.
8.	Muhamma d Ama Ridlwan, Slamet Muchsin, dan Hayat (2017)	Model Pengembangan Ekowisata dalam Upaya Pemberdayaa n Masyarakat Lokal ²⁶	Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai desa wisata.	Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti yaitu perbedaan pada obyek.

Dengan banyaknya persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu ini dapat diketahui bahwa politik pariwisata merupakan sebuah tindakan yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hal tersebut tanpa di sadari oleh masyarakat yang belum tahu tentang dunia politik pariwisata.

Persamaan mengenai desa wisata merupakan hal yang tidak asing bagi kalangan milenial. Pada penelitian yang berfokus pada politik pariwisata banyak sekali peristiwa politik pariwisata yang dilakukan oleh aktor-aktor yang dapat meningkatkan perekonomian serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan wisata. Dengan adanya persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka penelitian terdahulu saya buat acuan untuk melakukan penelitian yang sama dengan isu-isu serta lokasi penelitian yang berbeda.

C. Kerangka Berfikir

Pada poin ini, pengelolaan wisata di Desa wisata Rahtawu terdapat beberapa permasalahan antara lain yaitu :

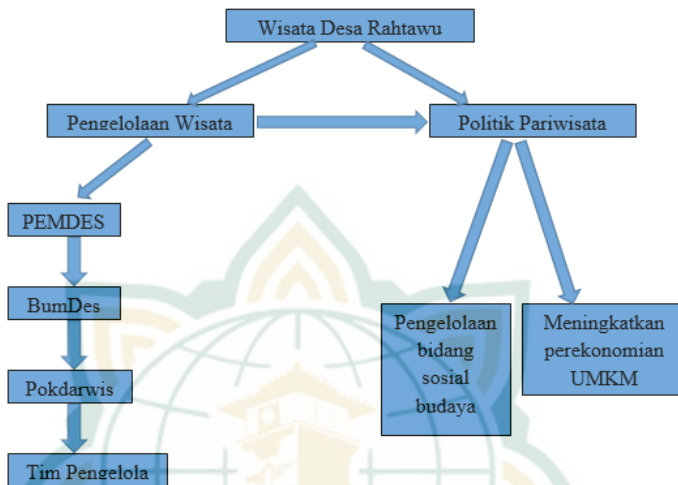
Pengelolaan wisata di Desa Rahtawu yang dikelola Bumdes hanya sebagian kecil saja, dikarenakan sebagian besar wisata dikelola masyarakat individual. Alasan yang di argumenkan yaitu karena mereka lebih lama dalam pengelolaan wisata yang mana hasilnya lebih banyak.

²⁵ Yoga Adi Pradana, Ratna Istriyani, Sepakat-Sepaket: Modal Sosial Politik Masyarakat Kalitebuk Dalam Mewujudkan Desa Wisata, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 6, Number 2, Desember 2020*, 138-149

²⁶ Muhammad Ama Ridwan, Dkk, Model Pengembangan Ekowisata Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Lokal, *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 2 (2) (2017) 141-158*.

Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Kerangka berfikir yang dimaksud dari penelitian ini yaitu, pengelolaan wisata yang ada di Desa Rahtawu terdapat pengelolaan yang dilaksanakan dengan beberapa organisasi masyarakat yang diantaranya PEMDES, BumDes, Pokdarwis, dan terdapat juga Tim pengelola. Politik pariwisata yang terjadi di Desa Rahtawu, kurang lebihnya mengenai pengelolaan bidang social kemasyarakatan dan peningkatan perekonomian UMKM.